

SKRIPSI

**STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
(BAWASLU) PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MENCEGAH
PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) 2019
MELALUI MEDIA SOSIAL**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Bidang Ilmu Politik**



Oleh :
MUHAMMAD ITHOFIYUL KARIM
NIM. I71215032

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
JUNI 2021**

PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Ithofiyul Karim

NIM : 171215032

Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul : Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Provinsi Jawa Timur dalam Mencegah Pelanggaran
Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Media Sosial.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 26 Juni 2021

Yang menyatakan



Muhammad Ithofiyul Karim

NIM: 171215032

PERSETUJUAN PEMIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : **Muhammad Ithofiyul Karim**

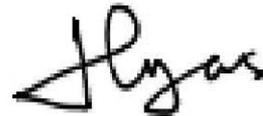
NIM : I71215032

Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul **“STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MENCEGAH PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) 2019 MELALUI MEDIA SOSIAL”**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana S.Sos. dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 19 Juni 2021

Pembimbing



Moh. Ilyas Rolis, S.Ag., M.Si

NIP:197704182011011007

PENGESAHAN

Skripsi oleh Muhammad Ithofiyul Karim dengan judul: “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Melalui Media Sosial” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 9 Juli 2021.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



(Moh. Ilyas Rolis, S.Ag., M.Si)
NIP: 197704182011011007

Penguji II



(Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si)
NIP: 197803152003121004

Penguji III



(Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si)
NIP: 196909071994032001

Penguji IV



(M. Zimamul Khaq, M.Si)
NIP: 198212022015031002

Surabaya, 9 Juli 2021

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dekan

Prof. Akh. Muzakki, Grad. Dip. SEA, M.Ag, M.Phil, Ph.D.
NIP. 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Ithofiyul Karim
NIM : I71215032
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Politik
E-mail address : ithofiyul@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (... ..)

yang berjudul :

**"STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI JAWA
TIMUR DALAM MENCEGAH PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) 2019
MELALUI MEDIA SOSIAL"**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Juli 2021

Penulis

Muhammad Ithofiyul Karim

5.	Andi Setiawan dan Hilmi Handala	Jurnal Academia Praja Volume 3 Nomor 2 – Agustus 2020, dengan judul “JEJARING BAWASLU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK”	<p>Penelitian ini mengkaji tentang Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia yang kemudian disebut dengan Bawaslu RI dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu dari tiga lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu RI dalam menjalankan fungsi pengawasannya melakukan hubungan antar lembaga yang dikategorikan menjadi empat subjek yaitu: (1)Lembaga Pemerintah, (2)Non Government Organization (NGO), (3)Perguruan Tinggi, dan (4)Media. Dalam menjalankan hubungan antar lembaga tersebut telah diimplementasikan dalam Network Governance yaitu membentuk persepsi/interpretasi, menentukan aktor/sumberdaya, dan membangun institusi/norma. Kemudian, melalui data hubungan antar lembaga Bawaslu RI cenderung memiliki arah untuk membangun hubungan dengan lembaga pemerintah dibanding tiga subjek lainnya seperti NGO, Perguruan Tinggi dan Media.</p>
6.	Dede Sri Kartini	Journal of Governance, Desember 2017 Volume 2, No. 2, dengan Judul DEMOKRASI DAN PENGAWASAN	Pemilu yang merupakan salah satu pilar demokrasi, telah memberi kesempatan kepada rakyat secara langsung untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Namun pemilu

		PEMILU	<p>juga bisa dipandang baik secara bottom-up maupun top-down. Indonesia yang menggunakan pemilu secara bottom-up, memiliki tujuan pemilu yaitu untuk merekrut pejabat politik secara sah dan damai. Untuk mencapai tujuan itulah diperlukan pengawasan pemilu, agar tujuannya tercapai. Setelah melakukan kajian pustaka, penulis mengusulkan definisi pengawasan pemilu sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik secara struktural maupun non struktural untuk mencapai tujuan pemilu. Pengawasan pemilu diperlukan agar demokrasi berjalan dengan penuh keadilan, dan pemilu dilaksanakan secara jujur</p>
7.	Ratnia Solihah, Arry Bainus dan Idin Rosyidin	JWP (Jurnal Wacana Politik) Volume. 3, Mei 2018, dengan Judul “PENTINGNYA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENGAWAL PEMILIHAN UMUM YANG BERINTEGRITAS DAN DEMOKRATIS”	<p>ulisan ini mengkaji tentang pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal penyelenggaraan pemilu, yang bertujuan untuk menciptakan pemilu yang berintegritas dan demokratis. Walaupun telah dibentuk berbagai lembaga pengawas pemilu, baik di tingkat Pusat (Bawaslu), di tingkat Daerah (Panwaslu), maupun DKPP sebagai lembaga yang khusus menangani pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, namun dalam penyelenggaraannya masih ditemui berbagai pelanggaran</p>

